

**Volume 5 nomor 2, Oktober 2021**

**EISSN 2460 - 0105**

J U R N A L   E L E K T R O N I K  
**HUKUM  
BISNIS**  
**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN NOMINE ATAS HAK KEPEMILIKAN BAGI WARGA  
NEGARA ASING**

**Oktafredianus Dede Lisiansu Dan Tutiek Retnowati**

**REVITALISASI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**Woro Winandi Dan Endah Lestari D.**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN  
PERTAMBANGAN DI LUAR TITIK KOORDINAT IJIN OPERASI PRODUKSI**

**Djainudin Wijaya**

**KEWENANGAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 PASAL 15 AYAT 3 YANG  
MEMPERBOLEHKAN MEMBUAT AKTE IKRAR WAKAF**

**Ahmad Nurul Huda**

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN  
PENYITAAN AKTA MINUTA KEPADA PENYIDIK**

**Bilqis Zuhriyah**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA DALAM RANGKA PEMENUHAN  
KESEJAHTERAAN WARGA MASYARAKAT DITENGAH PANDEMIK COVID-19**

**Pramitasari, Andiani Oktavia Safitri, Unggul Satoto Dan Muda Dziqullah Haq**

**RELAKSASI KREDIT PERBANKAN BAGI PELAKU USAHA DALAM MASA PANDEMI COVID  
19**

**Suwardi dan Indrati Rini**

**EISSN: 2460 - 0105**



**9 772460 010004**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**ALAMAT REDAKSI:**

**Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982**

**Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>**

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA DALAM RANGKA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN WARGA MASYARAKAT DITENGAH PANDEMIK COVID -19**

**Pramitasari<sup>1</sup>, Andiani Oktavia Safitri<sup>2</sup>, Unggul Satato<sup>3</sup>, dan Muda Dzikrillah Haq<sup>4</sup>**

Universitas Narotama Surabaya

pramita2110@gmail.com<sup>1</sup>, Andianioktaviassafitri@gmail.com<sup>2</sup>, Ungsato@Yahoo.Com<sup>3</sup>

mudad42@gmail.com<sup>4</sup>

## **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has changed the whole structure of community and state life and has the potential to disrupt the stability of government administration and the general interests of the people in the region. This condition must be immediately addressed by each local government by adopting an effective legal policy oriented to the protection and fulfillment of the rights of citizens. PRIVATE THE PROBLEM The Surabaya City Government has established a Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) in the context of handling the spread of the Covid-19 pandemic. But on one side does the policy meet the welfare of the citizens? This legal research aims to examine the legal policies of the City Government of Surabaya in the context of handling the spread of the Covid-19 pandemic and the fulfillment of the welfare of the citizens of Surabaya amid the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** Covid-19, Regional Government Of Surabaya City, Community welfare

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan Daerah Kota Surabaya merupakan bagian dari subsistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Yang Diberikan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Asas otonomi dan tugas Pembantuan. Pemerintahan Daerah Kota Surabaya diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Surabaya berstatus sebagai kota yang menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur. Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen. Jenis batuan

yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C. Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan. Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT).<sup>1</sup>

Proyeksi Penduduk Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2020

Umur	Proyeksi Penduduk Kota Surabaya (Jiwa)		
	Laki-laki 2020	Perempuan 2020	Jumlah 2020
0-4	106096	101785	207881
9-May	106192	102441	208633
14-Oct	98710	94735	193445
15-19	108057	117814	225871
20-24	145046	147368	292414
25-29	138428	136003	274431
30-34	125760	125530	251290
35-39	115853	117878	233731
40-44	105416	108898	214314
45-49	95330	101506	196836
50-54	87930	96000	183930
55-59	73813	82107	155920
60-64	53836	54715	108551
65-69	37547	35425	72972
70-74	20109	21331	41440
75+	17030	26062	43092

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021

---

Total	1435153	1469598	2904751
-------	---------	---------	---------

---

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Diakses 26 Mei 2020.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di Surabaya dipimpin oleh Wali kota.<sup>3</sup> Termasuk hal penanganan *Covid-19* Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah rantai penularan *Covid-19*. Dengancara melakukan koordinasi pada Pemerintah Daerah yang akan membantu menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut. Salah satu pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Kota Surabaya, yang turut serta menjalankan kebijakan dari Pemerintah pusat yang melalui dari perintah Pemerintah daerah yaitu Gubernur Jawa Timur untuk menangani wabah *Covid-19* yang semakin meningkat jumlahnya masyarakat yang positif *Covid-19*.

Penyebaran *Covid-19* di Indonesia bermula pada awal bulan Maret yang dimana ada dua masyarakat yang Positif *Covid-19* Berasal dari Depok, Jawa Barat. Penyebaran yang sangat cepat dari awal Maret sampai Bulan Mei mencapai angka 13.000 jiwa yang positif *Covid-19*.<sup>4</sup> Saat ini berbagai upaya untuk Pencegahan Pemutusan mata rantai *Covid-19* sudah dilakukan baik masyarakat maupun Pemerintah bersama-sama melawan *Covid -19* agar segera hilang dari Indonesia.

*Coronavirus Disease 2019* atau *Covid-19* adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Gejala klinis yang muncul beragam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang komplikasi berat (*pneumonia* atau *sepsis*). Penularannya dengan cara :

1. Lewat droplet atau percikan saat batuk, bersin, atau berbicara
2. Kontak fisik dengan orang terinfeksi (menyentuh atau jabat tangan)
3. Menyentuh mulut, hidung dan mata dengan tangan yang terpapar virus.

Gejala tersebut disertai riwayat sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Data Penduduk Daerah Kota Surabaya, [surabayakota.bps.go.id](http://surabayakota.bps.go.id)

<sup>3</sup> UU No. 12 Tahun 1950

<sup>4</sup> Asal Mula Covid 19 di INDONESIA News Detik.com

1. Melakukan perjalanan kenegara/daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal *Covid-19* pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala.
2. Kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke negara-negara/daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal *Covid-19*
3. Kontak erat dengan orang-orang berasal dari negara/daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal *Covid-19*
4. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi *Covid-19*
5. Riwayat kontak erat (minimal 15 menit dengan jarak kurang dari 2 meter) dengan pasien terkonfirmasi *Covid-19*.<sup>5</sup>

Oleh karena penyakit virus corona ini masih baru, sehingga untuk pengobatannya masih dalam pengembangan oleh para ahli kesehatan. Maka Peran pemerintah pusat yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan. Beberapa kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

1. Kebijakan keringanan pada biaya listrik.
2. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
3. Kebijakan larangan mudik
4. Kebijakan keringanan kredit
5. Kebijakan Gelontorkan anggaran Rp. 405,1 Triliun

(Yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Stabilitas Perekonomian di masa Pandemi *Covid-19*. Anggaran tersebut diambil dari APBN 2020, sebagai upaya meminimalisir dampak wabah *covid-19* terhadap perekonomian. Anggaran Rp. 405,1 Triliun akan digunakan untuk dana kesehatan sebesar Rp 75 triliun, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau safety net (SSN), Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan. Dana tersebut termasuk Rp 150 triliun yang nantinya akan dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan usaha.).

Pada beberapa kebijakan - kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah daerah untuk membantu Masyarakat yang terdampak dari *Covid-19* khususnya pada Masyarakat dari kalangan menengah kebawah

---

<sup>5</sup> Bunga RAMPAI COVID-19:Edisi 1 Maret 2020 PD.Prokami Kota Depok

serta yang terkena dampak dari adanya *Covid-19* agar kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi selama masa *Covid-19*. Oleh karena itu penulis memilih judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Dalam Rangka Pemenuhan Kesejahteraan Warga Masyarakat Ditengah Pandemi *Covid-19*” untuk menelaah dan mengkaji kebijakan - kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam upaya dan penanganan Pencegahan wabah *Covid-19*, apakah sudah tepat atau belum kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penanganan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Dalam Mengatasi Penyebaran Pandemi *Covid-19***

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya untuk menekan dan mencegah penyebaran virus corona baru (*Covid-19*) sehingga gerakan yang dilakukan berlaku efektif. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) pun bergerak untuk mengantisipasi penyebaran virus corona baru tersebut. Pada awal pekan ini, Risma menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan untuk mencegah penularan virus tersebut pada Senin, 16 Maret 2020. Rapat koordinasi itu dihadiri oleh perusahaan transportasi, pengusaha mal, hotel, tempat hiburan dan berbagai instansi lainnya di Surabaya, Jawa Timur. Tak seperti rapat koordinasi biasanya. Sebelum masuk dan naik ke ruang rapat di Graha Sawunggaling, para peserta dicek suhu tubuhnya, diberikan masker dan juga diberi hand sanitizer. Peserta yang ikut dalam rapat koordinasi itu menggunakan masker dan kursi duduk juga sudah diatur berjarak sekitar 1 meteran. Saat rapat koordinasi itu, Tri Rismaharini meminta kepada semua stakeholder itu untuk membuat protokol pencegahan *Covid-19* di area mereka masing-masing. Hal ini sangat penting untuk menekan penularan virus tersebut. "Sebenarnya memang disarankan untuk tidak mengadakan pertemuan, tapi saya harus lakukan ini supaya mereka membuat protocol di sekitar mereka masing-masing, sehingga diharapkan pencegahannya bisa lebih efektif," kata Risma.

Berikut sejumlah imbauan Risma dan dukungan MUI Surabaya untuk mengatasi penyebaran virus corona baru tersebut yang dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (17/3/2020):

- 1) Wali Kota Minta Stakeholder Buat Protokol



Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) mengatakan, Pemkot Surabaya sudah membuat beberapa protokol untuk mencegah virus tersebut. Salah satu dengan membiasakan cuci tangan saat hendak masuk kantor, di tempat umum harus disediakan thermo scan, di masjid dan musala karpetnya harus digulung. "Jadi, mari kita buat protokol yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya masing-masing, silakan disesuaikan," ujar dia. Ia mencontohkan, di hotel-hotel dan mal diharapkan sudah menyediakan thermo scan dan hand sanitizer. Di samping itu, ia juga mencontohkan prokol yang bisa diberlakukan bagi karyawan yang kondisinya panas dan ada gejala *Covid-19*, diharapkan dengan kesadaran dirinya langsung istirahat di rumahnya supaya tidak menyebarkan virus. Saat itu, pemkot juga memberikan hand sanitizer kepada beberapa instansi dan perkantoran. "Kami juga akan terus melakukan disinfektan ke beberapa tempat. Ini sudah bergerak mulai dari Balai Kota," ujar dia.

2) Surat Edaran ke Masjid dan Musala

Pemkot Surabaya menyebarkan surat edaran kepada seluruh pengurus masjid dan musala di berbagai titik Kota Pahlawan. Surat edaran itu, berupa imbauan agar meningkatkan sanitasi masjid dan musala untuk mengantisipasi virus corona. Imbauan itu antara lain dengan cara rutin membersihkan lantai tempat ibadah secara teratur dengan cairan disinfektan. Selain itu, pengurus tempat ibadah juga diimbau agar menyiapkan sabun antiseptik dan hand sanitizer di toilet area tempat ibadah. Selain itu juga mengimbau para jamaah agar membawah sajadah, sapu tangan, dan kain bersih sebagai alas sujud masing-masing.

3) Siapkan Laman Khusus

Selain menyebarkan surat edaran ke seluruh pengurus masjid dan musala, Pemkot Surabaya telah menyiapkan situs atau laman khusus. Dalam situs tersebut berisi informasi atau petunjuk cara mengantisipasi dan melawan persebaran *Covid-19*. Wali Kota Surabaya Risma menuturkan, melalui situs yang diberi nama Lawan *Covid-19* ini, masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam mencegah dan mengantisipasi persebaran virus corona sedini mungkin. "Saya berharap seluruh warga Surabaya mengikuti ini. Kita usahakan semua bisa

diakses melalui mobile apps. Sehingga masyarakat bisa mengetahui progresnya dan apa yang harus dilakukan sedini mungkin,” ujar dia.

4) MUI Surabaya Dukung Penuh Upaya Pemkot Surabaya

Sekretaris Umum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya, Muhammad Munif mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Pemkot Surabaya dalam rangka mencegah persebaran *Covid-19*. Khususnya, di lingkungan Masjid, Musala atau tempat ibadah lainnya. “MUI Surabaya kurang lebih 10 hari sudah mengumumkan, pertama agar menjaga kebersihan masjid, toilet masjid, ruang utama imam dan lain-lain. Karena ini sebuah virus yang tidak diketahui,” kata Munif, Senin, 16 Maret 2020. Selain itu, kata dia, beberapa kebijakan lain yang telah diambil salah satunya adalah mengimbau para pengurus Masjid dan Musala agar rutin membersihkan karpet atau alas sholat. “Kebijakan itu sudah kita ambil, karpet harus dilempit dan dipel, dibersihkan untuk mencegah virus itu dan ikhtiar kita secara maksimal,” ujarnya. Dia menuturkan, terdapat 1.830 Masjid yang tersebar di seluruh titik Kota Surabaya. Namun begitu, pihaknya memastikan, para pengurus Masjid sebelumnya telah menyadari akan hal itu. Apalagi, sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadhan. “Kalau kebersihan Masjid setiap hari kita bersihkan, terutama saat hari Jum’at. Apalagi ini kan menjelang bulan suci Ramadhan,” kata dia.

5) Penyemprotan Disinfektan

Mengutip akun instagram dkppsurasabaya, Pemkot Surabaya melakukan penyemprotan di beberapa lokasi antara lain kantor, fasilitas umum, mal, pasar dan akan berlanjut ke tempat lainnya. Penyemprotan itu dilakukan mulai 16 Maret 2020 dan dilakukan di sejumlah lokasi antara lain Balai Pemuda, Siola dan Koridor, THR Mall, Balai Kota, Jemirto, Terminal TOW, Terminal Bungurasih. Lalu Stasiun Semut, Stasiun Wonokromo, Stadion 10 November, Lapangan TR, Lapangan Hoki, Pasar Keputran Utara, Pasar Wonokromo, Taman Bungkul, Taman Mundu, Taman Sejarah, Masjid, Gereja, Wihara dan Pura. Selain itu, dinas perhubungan juga menyemprot cairan disinfektan di sejumlah Suroboyo



Bus Terminal Purabaya. Di setiap kursi, jendela dan tiang dilakukan penyemprotan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.<sup>6</sup>

## 2. Pemenuhan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kota Surabaya Ditengah Penanganan Penyebaran Pandemi *Covid-19*

Saat ini Negara sedang mengalami dampak dari adanya *Covid-19*, Mulai dari aspek Kehidupan, Ekonomi, kesehatan, Sosial dan Budaya. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Untuk menangani masalah *Covid-19* ke masyarakat dengan memerintahkan Pemerintah daerah untuk melakukan penanganan Persoalan *Covid-19* pada bidang Kesehatan, Bantuan sosial, Insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM Supaya dapat berproduksi, Pengalihan biaya Operasi APBD untuk penangan dampak *Covid-19* sangatlah perlu dilakukan untuk bisa membantu masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kena dampak langsung dari virus corona. Sesuai dengan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi “ Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ”. Dan pada Pasal 5 ayat 1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. masyarakat.

Penyelenggara bantuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah Surabaya berupa Bantuan sosial Pemerintah Surabaya diminta Kementerian Sosial untuk Penyampaian data Nama, Alamat masyarakat yang akan menerima Baksos Data itu sebagai dasar pemberian bantuan sosial tunai kepada warga masyarakat terdampak covid-19 senilai Rp 600 ribu/KPM per bulan selama tiga bulan Secara bergiliran .Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan Bantuan Kepada wali kota Surabaya selain bansos uang tunai Wali kota Surabaya juga mendapatkan bantuan suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian juga program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren Besarannya yakni Rp 500 ribu per orang/bulan selama tiga bulan dengan sasaran 600 ponpes dengan masing-masing 20 warung.

Supaya kesejahteraan dan kesediaan bahan Pangan dan kesehatan dapat terus ada pada masyarakat di tengah Adanya dampak dari *Covid-19* saat ini Bantuan social yang saat ini sudah dapat di terima masyarakat berupa dana pelapisan pada keluarga penerima manfaat

---

<sup>6</sup> Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penekanan dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* – Surabaya.liputan6.com

(KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan yang di berikan melalui tunai oleh ketua RT setempat untuk di bagikan kepada masyarakat Penerimaanya bisa bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun dari non DTKS. Dengan intervensi ini, maka setiap KPM berbasis kelurahan, tidak hanya mendapatkan bantuan Rp 200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp 100 ribu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.<sup>7</sup>

Kota Surabaya mendapatkan top up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 118.758 KPM yang setara 5,67 Milyar karena mengingat Surabaya sedang melakukan masa PSBB dan Surabaya juga merupakan daerah yang padat penduduk sehingga anggaran bantuan social masyarakat Surabaya yang paling banyak. Selain Bantuan Pangan dan Uang Tunai. Cara Pemerintah untuk memberikan fasilitas kesejahteraan masyarakat sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Yang dimana masyarakat harus menjaga kesehatan tubuh melalui kesedian pangan digunakan untuk kehidupan sehari hari.<sup>8</sup> Bantuan Pemerintah selain berupa bantuan Pangan dan uang tunai Pemerintah Surabaya juga memberikan fasilitas Kesehatan, Berupa minuman dan makanan untuk mencukupi imun tubuh dan mencegah *Covid -19* sarana umum juga di sediakan oleh pemerintah untuk mencegah *Covid-19* dengan, Menghimbau masyarakat yang akan keluar rumah untuk selalu memakai masker, Menyediakan tempat cuci tangan di tempat fasilitas umum seperti Pasar, Masjid, Gang Kampung dll.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

*Covid-19* sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit serius seperti *MERS* dan *SARS* Penularanya dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularanya dari manusia ke manusia sangatlah terbatas. *Covid-19* dapat menjangkit manusia dengan Gejala maupun tanpa Gejala di antara ciri ciri Gejala yang timbul berupa: demam, pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan Sesak nafas. Sedangkan yang tanpa gejala biasa terjadi pada seseorang yang Nampak sehat. Sedangkan dari beberapa kasus Virus ini dapat menyebabkan resiko kematian. Orang-Orang yang sudah lanjut usia dan memiliki penyakit dalam di antaranya (Asma, Jantung, Diabetes) memiliki resiko yang sangat tinggi terkena *Covid-19*. Oleh karena penyakit virus corona ini masih baru, sehingga

---

<sup>7</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020

<sup>8</sup>Peraturan Walikota Surabaya No.16 Tahun2020

untuk pengobatannya masih dalam pengembangan oleh para ahli kesehatan. Maka Peran pemerintah yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan upaya dalam penekanan dan pencegahan penyebaran *covid-19*. Peran pemerintah yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan.

## 2. Saran

Mengatasi Permasalahan mengenai Penanganan *Covid-19* Tak hanya Peran Pemerintah dan para Medis yang memerangnya namun masyarakat bersama bisa membantu mengurangi penyebaran dengan selalu mematuhi Protokol dan himbauan dari Pemerintah dengan tidak berpergian bila tidak perlu, tidak mudik ke kampung halaman demi menjaga kesehatan keluarga di kampung halaman, Cuci tangan memakai sabun setiap habis berpergian diluar rumah dan selalu memakai masker ketika hendak berpergian setiap ber sama melawan *Covid -19* agar supaya *Covid-19* di Indonesia ini bisa hilang dan Negara bisa aman serta menata perekonomian yang sudah terkendala selama adanya *Covid-19*. Kebijakan Kebijakan dari Pemerintah sebaiknya harus selalu berjalan sesuai dengan semestinya supaya masyarakat tidak mengalami keresahan selama masa pandemik *Covid-19* agar kesejahteraan masyarakat bisa terus terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab\\_2.pdf](https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf) , Diakses pada 26 mei 2020
- <https://surabayakota.bps.go.id/dynamictable/2018/04/18/24/proyeksi-penduduk-kota-surabaya-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-tahun-2020.html>, Diakses pada 26 mei 2020
- <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia> , Diakses pada 22 Mei 2020
- [https://www.setneg.go.id/baca/index/pentingnya\\_kerja\\_sama\\_pemerintah\\_pusat\\_dan\\_daerah\\_dalam\\_penanganan\\_covid\\_19](https://www.setneg.go.id/baca/index/pentingnya_kerja_sama_pemerintah_pusat_dan_daerah_dalam_penanganan_covid_19), Diakses 22 Mei 2020
- <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/data-sebaran-covid-19-di-surabaya-diharapkan-disajikan-secara-utuh/> , Diakses 8 Mei 2020

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/160000765/5-kebijakan-jokowi-tangani-covid-19-gratiskan-tarif-listrik-hingga?page=all>, Diakses pada 5 Mei 2020.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

KEPRESS No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *COVID-19* Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Timur



**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER HUKUM**  
**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982  
Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>